

# OPTIMALISASI PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MENGATASI PENANGGULANGAN DARURAT SAMPAH TPA REGIONAL PAYAKUMBUH

Mukhlis<sup>1\*</sup>

Prgram Studi Doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang<sup>1</sup>

\*Corresponding Author : mukhlis\_nabil@yahoo.com

## ABSTRAK

Masalah sampah di Indonesia dan dunia berdampak serius pada lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekologis. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif seperti investasi infrastruktur pengelolaan sampah, kampanye edukasi, regulasi ketat, dan kebijakan pengurangan sampah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan, dan mengoptimalkan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Regional Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis deskriptif untuk pemahaman komprehensif tentang faktor pendorong dan penghambat kebijakan pengelolaan sampah, serta solusi alternatif. Pengelolaan sampah di Regional Payakumbuh menghadapi berbagai masalah seperti infrastruktur terbatas, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengelolaan tidak berkelanjutan, kurangnya regulasi dan penegakan hukum, serta ketergantungan pada solusi tradisional. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat, regulasi yang kuat, solusi inovatif, serta peran aktif dari legislatif dan eksekutif. Saran untuk meningkatkan pengelolaan sampah meliputi: 1) Kampanye kesadaran yang komprehensif, infrastruktur yang memadai, kebiasaan konsumsi berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat aktif; 2) Investasi dalam program pelatihan dan pendidikan untuk perekrutan dan retensi tenaga terampil.

**Kata kunci** : infrastruktur, kebijakan, kesadaran, regulasi, sampah

## ABSTRACT

*The waste management issue in Indonesia and globally has serious impacts on the environment, health, and ecological sustainability. This research aims to identify waste management problems, factors affecting policy implementation, and optimize waste management policies at the Payakumbuh Regional Landfill (TPA). The research method used is literature review with descriptive analysis to gain a comprehensive understanding of the driving and inhibiting factors of waste management policy implementation, as well as alternative solutions. Waste management in the Payakumbuh region faces several challenges, including limited infrastructure, lack of public awareness and participation, unsustainable management practices, inadequate regulations and enforcement, and reliance on traditional solutions. To overcome these challenges, a comprehensive approach involving various stakeholders, improvement of waste management infrastructure, increased public awareness, strong regulations, innovative solutions, and active roles from legislative and executive bodies are needed. Recommendations for improving waste management include: 1) Conducting comprehensive awareness campaigns, providing adequate infrastructure, encouraging sustainable consumption habits, and actively involving the community in waste management initiatives; 2) Investing in training and education programs for recruiting and retaining skilled personnel in waste management.*

**Keywords** : waste, infrastructure, policy, awareness, regulation

## PENDAHULUAN

Masalah sampah merupakan isu kritis di seluruh dunia, termasuk di daerah-daerah di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan manusia, biodiversitas, dan keberlanjutan

ekologis. Dalam konteks lokal, penanganan sampah sangat terkait erat dengan manajemen lingkungan yang menyeluruh, yang melibatkan berbagai fungsi dan peran dari pelaku kebijakan public. Fenomena pengelolaan masalah persampahan yang belum sesuai harapan, diantaranya disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk, pemahaman aparat yang masih bersifat sektoral, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam rangka mengoptimalkan. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada aspek teknis, tetapi juga membutuhkan pengaturan sistem yang efektif, struktur organisasi pengelola, sumber pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Berbagai bidang ilmu seperti perencanaan perkotaan, ekonomi, geografi, sosiologi, demografi, kesehatan masyarakat, komunikasi, dan lainnya turut diperlukan untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah dengan baik (Damanhuri, 2008).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, kampanye edukasi dan sosialisasi, pemberlakuan regulasi yang ketat, serta pembentukan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan sampah dan daur ulang adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan sampah di daerah. Berbagai negara di Asia telah mengembangkan beberapa kebijakan dan program pengelolaan sampah, seperti China membuat kebijakan pengelolaan sampah yang mewajibkan adanya pemilahan sampah dengan target tingkat daur ulang sampah domestik adalah 35% pada akhir tahun 2020. Malaysia menyusun regulasi yang mewajibkan pemilahan dan daur ulang limbah padat perkotaan, begitu juga Thailand juga telah mengeluarkan kebijakan /peraturan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah, namun belum maksimal akibat rendahnya partisipasi publik, implementasi kebijakan dan dukungan kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan, dan mengoptimalkan kebijakan pengelolaan sampah di TPA.

## METODE

Jenis studi yang akan dilakukan adalah studi literatur dengan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan secara komprehensif tentang faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, dan solusi alternatif dalam mengoptimalkannya. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, dokumen, buku serta berita media online dengan menggambarkan pelaksanaan dan menafsirkan data dan permasalahannya. Penelitian dilakukan pada wilayah pengguna TPA Regional Payakumbuh yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa permasalahan utama yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat diantaranya:

### Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah penuh, fasilitas pengolahan yang terbatas, dan sistem pengangkutan yang kurang efisien. Kondisi ini mengakibatkan banyak sampah berserakan di sekitar dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Menurut Sukartini, N., et al. (2020) TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan udara, serta

menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejauh ini telah melakukan sosialisasi dalam rangka program pengelolaan persampahan. Beberapa program pengelolaan persampahan yang telah berjalan sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah No.60 Tahun 2018 diantaranya Peningkatan pembangunan infrastruktur di TPA Sampah Regional dari tahun 2018 hingga 2025. Namun dalam implementasinya infrastruktur yang tersedia masih belum memadai dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk penampungan sampah.

### **Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah di beberapa daerah. Banyak masyarakat masih kurang peduli terhadap pentingnya memilah sampah, mengurangi sampah plastik, atau menggunakan kantong belanja *reusable*. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan juga lingkungan masyarakat yang tidak mendukung, ditambah kurang adanya sosialisasi atau pengarahan terkait perilaku ramah lingkungan dan minim sampah. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan peningkatan volume sampah dan kesulitan dalam mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang efektif. Menurut kandar, Z., & Fatimah, S. (2019) kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan efektif. Hal ini juga dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dimana Regulasi ini mengatur tentang pengelolaan sampah di wilayah Sumatera Barat, termasuk tanggung jawab pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Perda ini menekankan pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah.

### **Pengelolaan Tidak Berkelanjutan**

Masih mengandalkan metode pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan, seperti pembakaran terbuka atau pembuangan sampah ke sungai atau lautan. Hal ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius bagi masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan Wulandari, T., & Rahardjo, B (2019) terkait dampak negatif dari metode pembakaran terbuka sampah di daerah perkotaan. dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini menyebabkan pencemaran udara yang signifikan dan meningkatkan insiden penyakit pernapasan di masyarakat sekitar. Selain itu dalam penelitian Susanti, A., & Prasetyo, D (2020) menunjukkan bahwa sampah yang mencemari air menyebabkan berbagai penyakit kulit, diare, dan infeksi lainnya.

### **Kurangnya Regulasi dan Penegakan Hukum**

Kurangnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif terkait pengelolaan sampah dapat menghambat upaya penanggulangan sampah. Pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah seringkali tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Utami, S., & Prabowo, T(2020) mengatakan bahwa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang lemah terkait pengelolaan sampah sehingga tanpa penegakan yang tegas, regulasi yang ada tidak efektif dalam mengurangi pelanggaran.

### **Ketergantungan pada Solusi Konvensional**

Beberapa daerah masih mengandalkan solusi konvensional seperti pembuangan sampah ke TPA atau pembakaran sampah di lingkungan sekitar rumah tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti daur ulang, kompos, atau teknologi

pengolahan sampah modern. Menurut Handayani, S., & Rahmawati, D. (2020) kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti daur ulang. Dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif, pemprov sumatera barat dalam Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai telah memberikan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menggalakkan penggunaan tas belanja reusable dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya plastik bagi lingkungan.

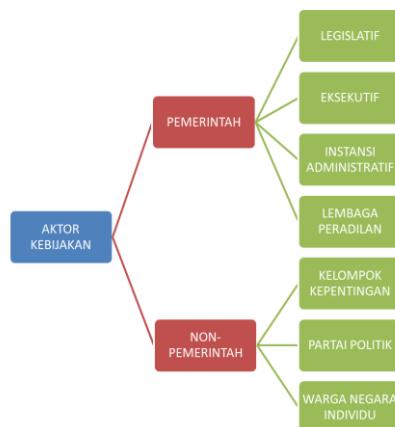
### **Ketidakseimbangan antara Timbulan Sampah dan Pengelolaan Sampah**

Ketidakseimbangan antara volume sampah dengan kapasitas pengelolaan sampah seringkali terjadi. Ini dapat mengakibatkan timbulan sampah yang berlebihan dan sulit ditangani, terutama di daerah yang padat penduduk. Dalam penelitian Lestari, E., & Prasetyo, A.(2020) mengakatakan bahwa ketidakseimbangan dari timbulan sampah yang berlebihan menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan yang serius. Dalam praktiknya Pemprov Sumatera Barat sudah mengatur hal ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang pengelolaan sampah di wilayah Sumatera Barat, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan pendanaan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara timbulan sampah dan kapasitas pengelolaan, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai.

### **Masalah Ekonomi dan Keuangan**

Pengelolaan sampah memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Namun, keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada pendanaan pemerintah seringkali menjadi kendala dalam membiayai program-program pengelolaan sampah yang efektif. Anggaran dana yang kurang dari pemerintah juga menjadi faktor kendala dalam penangannya. Ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, L., & Setiawan, M (2021) dimana menunjukkan bahwa investasi yang besar diperlukan untuk membangun dan memelihara infrastruktur pengelolaan sampah yang efektif.

Penanggulangan permasalahan sampah memerlukan pendekatan yang holistik melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta mengadopsi solusi-solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan sampah secara berkelanjutan. Identifikasi Permasalahan penanggulangan sampah dapat ditinjau dari aspek fungsi dan peran para aktor kebijakan publik sebagaimana gambar 1.



**Gambar 1. Aktor – Aktor Kebijakan Publik**

## **Identifikasi Permasalahan Aktor Kebijakan (Pemerintah)**

### **Legislatif**

Pemerintah legislatif memiliki peran yang penting dalam penanganan terhadap pengelolaan lingkungan terhadap peningkatan volume sampah, akan tetapi terdapat beberapa masalah yang sering terjadi diantaranya:

#### **Keterbatasan Sumber Daya**

Legislatif daerah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja. Hal ini dapat menghambat kemampuan legislatif daerah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan untuk mengawasi implementasi kebijakan tersebut dengan efektif. Ini sejalan dengan penelitian Adi, M. P., & Santoso, L. A(2018) bahwa anggaran yang minim dan kurangnya tenaga kerja terlatih menghambat pembuatan dan implementasi kebijakan yang efektif.

#### **Ketergantungan pada Pemerintah Eksekutif**

Legislatif daerah seringkali bergantung pada pemerintah eksekutif dalam hal teknis dan keahlian dalam pengelolaan sampah. Ketergantungan ini dapat menyebabkan kurangnya inisiatif legislatif dalam merumuskan kebijakan yang inovatif dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Sejalan dengan penelitian Handoko, S. B., & Wijaya, R(2019) mengatakan bahwa ketergantungan legislatif daerah pada pemerintah eksekutif dalam aspek teknis dan keahlian pengelolaan sampah ini membatasi inisiatif legislatif dalam merumuskan kebijakan inovatif dan solusi jangka panjang.

#### **Keterbatasan Pengetahuan Tentang Masalah Lingkungan**

Anggota legislatif daerah mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang masalah lingkungan, termasuk masalah penanganan sampah. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan urgensi masalah sampah dan kurangnya komitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Rahayu, N. P., & Pratama, A (2020) kurangnya pengetahuan lingkungan di kalangan anggota legislatif daerah menyebabkan rendahnya kesadaran dan komitmen dalam menangani masalah sampah.

#### **Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas**

Proses pembuatan kebijakan di legislatif daerah seringkali kurang transparan dan kurang akuntabel. Kurangnya keterbukaan ini dapat menyulitkan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, selain itu kurangnya keterbukaan menyulitkan pengawasan publik dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan terkait sampah (Saputra, A. H., & Haryanto, T,2021).

#### **Keterbatasan Wewenang**

Legislatif daerah seringkali memiliki keterbatasan wewenang dalam hal pengelolaan sampah, terutama jika wewenang tersebut lebih banyak dipegang oleh pemerintah eksekutif. Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh legislatif daerah dalam pengelolaan sampah menghambat kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menangani masalah sampah. Ketergantungan pada pemerintah eksekutif sering kali membatasi inisiatif kebijakan legislatif (Nurhadi & Susanto, 2018, p. 210).

#### **Kurangnya Sosialisasi terhadap Rencana/Program Pengelolaan Sampah**

Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak merasa terlibat atau termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kurangnya sosialisasi terhadap

program pengelolaan sampah mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat sering kali tidak merasa terlibat atau termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait" (Dewi & Utami, 2021, p. 95). Dengan memahami dan mengatasi kelemahan-kelemahan ini, legislatif daerah dapat meningkatkan kontribusinya dalam penanganan volume sampah dan memainkan peran yang lebih efektif dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berdaya dukung.

### **Eksekutif**

Peran eksekutif daerah memiliki dampak signifikan dalam upaya peningkatan volume sampah, namun, seperti halnya legislatif, eksekutif juga memiliki kelemahan. Eksekutif daerah, termasuk bupati/walikota dan instansi pemerintah yang terkait, memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Namun, eksekutif juga dapat menghadapi beberapa kelemahan dalam melaksanakan tugas tersebut. Berikut adalah beberapa kelemahan eksekutif daerah dalam pengelolaan sampah:

### **Keterbatasan Anggaran**

Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sampah secara efektif. Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan investasi dalam infrastruktur, teknologi, tenaga kerja, dan operasional, namun, seringkali anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Menurut Rahman & Ibrahim (2020), keterbatasan anggaran menimbulkan tantangan besar terhadap pengelolaan sampah yang efektif oleh pemerintah daerah. Dana yang tidak mencukupi sering kali membatasi investasi pada infrastruktur limbah, teknologi, dan biaya operasional.

### **Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah**

Daerah masih menghadapi masalah infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang memadai, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang penuh atau tidak sesuai standar, kurangnya fasilitas pengolahan sampah, dan sistem pengangkutan sampah yang tidak efisien.

### **Kurangnya Keterlibatan Masyarakat**

Keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada partisipasi dan kesadaran masyarakat. Namun, seringkali terjadi kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, atau mendukung program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan masyarakat memiliki kesadaran yang rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

### **Ketergantungan pada Solusi Konvensional**

Beberapa pemerintah daerah masih cenderung mengandalkan solusi konvensional dalam pengelolaan sampah, seperti pembuangan terbuka di TPA atau open dumping, tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti daur ulang atau pengomposan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan pengarahan kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan hal biasa dilakukan tanpa mencoba untuk menggunakan solusi terbarukan.

### **Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah, seperti pembuangan sampah ilegal atau pelanggaran terhadap aturan pengelolaan

TPA. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian lingkungan yang lebih besar dan merugikan upaya pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sejalan dengan penelitian Gupta & Sharma (2018) yang mengatakan bahwa Pengawasan dan koordinasi antar lembaga yang tidak memadai sering kali melemahkan efisiensi dan efektivitas program pengelolaan sampah kota. Memperkuat pengawasan peraturan dan meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintah sangat penting untuk meningkatkan hasil pengelolaan sampah.

### **Kurangnya Koordinasi Antarinstansi**

Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas program-program pengelolaan sampah serta menyebabkan tumpang tindih dalam kebijakan dan program.

### **Kurangnya Sosialisasi terhadap Rencana/Program Pengelolaan Sampah**

Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak merasa terlibat atau termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat keberhasilan implementasi suatu program. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah seperti peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.

### **Instansi Administratif**

Instansi administratif di daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Namun, instansi administratif juga dapat menghadapi beberapa kelemahan dalam melaksanakan tugas mereka. Berikut adalah beberapa kelemahan umum yang mungkin dihadapi oleh instansi administratif daerah dalam pengelolaan sampah:

#### **Keterbatasan Anggaran**

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Instansi administratif daerah adalah keterbatasan anggaran. Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia, dan operasional.

#### **Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah**

Tidak adanya tempat pembuangan akhir yang sesuai, fasilitas pengolahan sampah yang terbatas, dan sistem pengangkutan sampah yang efisien dapat menghambat upaya Instansi administratif dalam mengelola sampah dengan baik.

#### **Kurangnya Tenaga Kerja Terlatih**

Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas. Namun, seringkali Instansi administratif menghadapi kendala dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan sampah sehingga sumber daya manusia yang mampuni dalam bidang ini sangat sulit untuk didapatkan.

#### **Keterbatasan Teknologi dan Inovasi**

Adopsi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah masih terbatas di banyak daerah. Kurangnya akses terhadap teknologi yang efektif dan inovasi dalam pengelolaan

sampah dapat menghambat kemampuan Instansi administratif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan sampah.

### **Kurangnya Sosialisasi terhadap Rencana/Program Pengelolaan Sampah**

Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak merasa terlibat atau termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat keberhasilan implementasi suatu program. Mengatasi kelemahan-kelemahan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk alokasi anggaran yang memadai, peningkatan infrastruktur dan teknologi, kampanye edukasi yang intensif kepada masyarakat, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam pengelolaan sampah.

### **Lembaga Peradilan**

Sebagai lembaga peradilan, pengadilan daerah tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan sampah. Namun, mereka dapat memiliki peran dalam menangani sengketa atau perkara hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Meskipun begitu, ada beberapa faktor atau kendala yang dapat menjadi kelemahan dalam peran pengadilan daerah terkait pengelolaan sampah, antara lain:

#### **Keterbatasan Jurisdiksi**

Pengadilan daerah mungkin memiliki jurisdiksi yang terbatas dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sebagian besar masalah lingkungan dan sampah ditangani oleh instansi pemerintah non-peradilan seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup, sehingga pengadilan memiliki keterbatasan dalam intervensi langsung. Keterbatasan ini mengakibatkan pengadilan memiliki keterbatasan dalam intervensi langsung terhadap kasus-kasus lingkungan, termasuk masalah pengelolaan sampah.

#### **Keterbatasan Pengetahuan**

Pengadilan daerah seringkali menghadapi masalah terkait pengetahuan tentang isu-isu lingkungan dan pengelolaan sampah. Hakim dan personel di pengadilan daerah mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu lingkungan dan pengelolaan sampah. Ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam memahami dan menangani perkara yang berkaitan dengan masalah lingkungan, termasuk sengketa terkait pengelolaan sampah.

#### **Keterbatasan Sumber Daya**

Pengadilan daerah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi personel, anggaran, atau infrastruktur. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan pengadilan dalam menangani perkara-perkara lingkungan, termasuk perkara yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kondisi ini sering kali membuat proses hukum menjadi kurang efektif dalam menangani masalah secara menyeluruh.

#### **Proses Hukum yang Lambat**

Proses hukum di pengadilan seringkali memakan waktu yang cukup lama, terutama jika terjadi banding atau kasasi. Dalam konteks pengelolaan sampah yang membutuhkan penyelesaian cepat dan tindakan preventif, proses hukum yang lambat dapat menjadi kendala yang serius. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian perkara lingkungan,

yang pada gilirannya mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan masalah sampah secara tepat waktu.

### **Keterbatasan Peran Dalam Pencegahan**

Pengadilan daerah umumnya terlibat dalam penyelesaian sengketa atau perkara hukum setelah masalah terjadi. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam mencegah terjadinya masalah pengelolaan sampah mungkin terbatas, karena mereka tidak secara langsung terlibat dalam upaya pencegahan atau pengelolaan sehari-hari. Meskipun pengadilan daerah memiliki keterbatasan dalam peran mereka terkait pengelolaan sampah, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penting bagi pengadilan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka tentang isu lingkungan, serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya dalam upaya penanganan masalah pengelolaan sampah.

### **Identifikasi Aktor Kebijakan (Non-Pemerintah)**

#### **Kelompok Kepentingan**

#### **Kurangnya Sumber Daya**

Kelompok kepentingan daerah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk melakukan program-program pengelolaan sampah yang efektif. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan tindakan nyata dalam menangani peningkatan volume sampah. Tanpa dukungan yang memadai dari segi anggaran dan tenaga kerja, upaya pengelolaan sampah tidak dapat mencapai potensi maksimalnya.

### **Keterbatasan Teknis**

Beberapa kelompok kepentingan daerah mungkin kurang memiliki pengetahuan teknis atau keterampilan dalam pengelolaan sampah yang efektif. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam merancang dan melaksanakan program-program pengelolaan sampah yang tepat dan berkelanjutan. Tanpa keahlian teknis yang memadai, implementasi solusi-solusi inovatif dalam pengelolaan sampah bisa terhambat, mengakibatkan ketergantungan pada metode konvensional yang kurang berkelanjutan.

### **Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat**

Kelompok kepentingan daerah mungkin kesulitan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya untuk mengurangi volume sampah bisa menjadi kurang efektif. Pendidikan dan sosialisasi yang kurang memadai tentang manajemen sampah dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembuangan sampah yang berkelanjutan.

### **Tingkat Partisipasi yang Rendah**

Partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya penting dalam pengelolaan sampah yang berhasil. Namun, kelompok kepentingan daerah mungkin menghadapi tantangan dalam menggerakkan dan memotivasi partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Tanpa keterlibatan yang kuat dari masyarakat dan sektor terkait, implementasi kebijakan pengelolaan sampah akan sulit untuk mencapai dampak yang signifikan.

### **Keterkaitan dengan Masalah Lain**

Kelompok kepentingan daerah juga harus menghadapi tantangan dalam menangani masalah-masalah lain yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti

pencemaran lingkungan, kekurangan infrastruktur, atau masalah kesehatan masyarakat. Ini bisa menyebabkan penyebaran sumber daya dan perhatian yang terbatas. Pengelolaan sampah seringkali terjebak dalam dinamika masalah lingkungan yang lebih luas, memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

### **Kendala Regulasi dan Kebijakan:**

Terkadang, kelompok kepentingan daerah mungkin mengalami hambatan dalam implementasi program-program pengelolaan sampah karena kendala regulasi atau kebijakan yang tidak mendukung. Ini bisa termasuk peraturan yang ambigu atau kurangnya insentif untuk melakukan tindakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Tanpa landasan regulasi yang kuat dan insentif yang jelas, pemerintah daerah sulit untuk menggerakkan perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah.

Mengatasi kelemahan-kelemahan ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum, untuk merancang dan melaksanakan strategi pengelolaan sampah yang holistik dan berkelanjutan.

### **Partai Politik**

#### **Prioritas Politik yang Beragam**

Partai politik biasanya memiliki beragam prioritas politik yang mencakup berbagai isu, termasuk ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Akibatnya, isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah mungkin tidak selalu menjadi prioritas utama bagi partai politik, sehingga mengurangi perhatian dan dukungan mereka dalam upaya penanganan sampah. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah bisa kehilangan perhatian dan dukungan politik yang memadai, karena prioritas lain yang lebih mendesak atau populer di kalangan pemilih.

### **Keterkaitan dengan Konflik Kepentingan**

Dalam beberapa kasus, partai politik daerah mungkin memiliki keterkaitan dengan industri atau bisnis tertentu yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah, seperti industri manufaktur atau perhotelan. Hal ini bisa menyebabkan konflik kepentingan di antara tujuan politik dan upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Adanya konflik kepentingan semacam ini dapat menghambat keputusan politik yang proaktif dalam pengelolaan sampah.

### **Kurangnya Konsistensi Kebijakan**

Perubahan kebijakan yang sering terjadi di tingkat politik daerah dapat mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam strategi pengelolaan sampah. Pergantian kepemimpinan atau perubahan partai politik yang berkuasa dapat menyebabkan perubahan prioritas dan pendekatan dalam penanganan masalah lingkungan. Ketidakpastian ini dapat menghambat efektivitas kebijakan jangka panjang dalam mengatasi masalah sampah.

### **Keterbatasan Kapasitas dan Pengetahuan**

Partai politik daerah mungkin kurang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai dalam hal pengelolaan sampah. Ini termasuk pemahaman tentang teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah serta kebutuhan akan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan. Tanpa kapasitas yang memadai, implementasi kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sampah bisa terhambat, mengakibatkan penanganan sampah yang suboptimal. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari partai politik daerah untuk mengintegrasikan isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, ke dalam agenda politik mereka secara konsisten. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi masyarakat yang luas juga penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pengelolaan sampah yang diimplementasikan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

## **Warga Negara**

### **Kurangnya Kesadaran Lingkungan**

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan sebagian individu. Banyak orang mungkin tidak menyadari dampak negatif dari perilaku mereka terhadap lingkungan, termasuk peningkatan volume sampah. Kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan sebagian individu merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah. Banyak orang mungkin tidak menyadari dampak negatif dari perilaku mereka terhadap lingkungan, termasuk peningkatan volume sampah. Tanpa kesadaran yang cukup, upaya untuk mengubah perilaku konsumsi dan pengelolaan sampah akan sulit dilakukan secara efektif.

### **Kurangnya Pendidikan dan Informasi**

Beberapa individu mungkin tidak memiliki akses atau akses terbatas terhadap informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kurangnya akses atau informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pendidikan yang memadai tentang cara memilah, mengurangi, dan mendaur ulang sampah diperlukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku individu terkait sampah.

### **Kebiasaan Konsumsi yang Tidak Berkelanjutan**

Kebiasaan konsumsi yang tidak berkelanjutan, seperti menggunakan barang-barang sekali pakai atau mengonsumsi makanan dalam kemasan berlebihan, dapat menyebabkan peningkatan volume sampah. Beberapa individu mungkin sulit untuk mengubah kebiasaan konsumsi mereka tanpa kesadaran dan pendidikan yang cukup. Mengubah kebiasaan konsumsi individu memerlukan kesadaran yang tinggi akan dampak lingkungan serta akses terhadap alternatif yang lebih ramah lingkungan. Tanpa kesadaran dan edukasi yang cukup, individu mungkin sulit untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari kebiasaan konsumsinya.

### **Keterbatasan Akses ke Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah:**

Di beberapa daerah, akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai mungkin terbatas. Kurangnya tempat pembuangan sampah yang aman dan sistem pengelolaan sampah yang efektif dapat mempersulit individu untuk membuang sampah dengan benar. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya pengelolaan sampah akan terhambat dan masyarakat mungkin cenderung melakukan pembuangan sampah secara tidak bertanggung jawab.

### **Kesulitan Dalam Mengubah Perilaku**

Mengubah perilaku individu memerlukan komitmen dan kesadaran yang tinggi. Beberapa individu mungkin menghadapi kesulitan dalam mengubah kebiasaan lama mereka terkait pengelolaan sampah, terutama jika tidak ada dukungan atau insentif yang memadai dari lingkungan sekitar. Tanpa motivasi atau kesadaran yang cukup, perubahan perilaku akan sulit dicapai.

### **Tingkat Keterlibatan yang Rendah**

Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah, tingkat keterlibatan aktif individu dalam upaya pengelolaan sampah mungkin masih rendah. Beberapa individu

mungkin merasa bahwa peran mereka dalam menangani masalah ini tidak signifikan atau bahwa tanggung jawab itu sepenuhnya terletak pada pemerintah atau lembaga lainnya. Pentingnya meningkatkan partisipasi aktif individu dalam pengelolaan sampah menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan program-program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Mengatasi kelemahan-kelemahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan dan kampanye kesadaran yang lebih luas, penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, pembangunan kebiasaan konsumsi yang berkelanjutan, serta upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara aktif.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan sampah di daerah Regional Payakumbuh dihadapkan pada berbagai permasalahan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengelolaan tidak berkelanjutan, kurangnya regulasi dan penegakan hukum, serta ketergantungan pada solusi konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat, regulasi yang kuat, solusi inovatif, serta peningkatan peran legislatif dan eksekutif dengan peningkatan anggaran, infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Instansi administratif, lembaga peradilan daerah, dan kelompok kepentingan daerah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, namun mereka juga dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di daerah tersebut.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti menyampaikan terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, M. P., & Santoso, L. A.(2018), "Keterbatasan Sumber Daya Legislatif dalam Pengelolaan Sampah di Kota Besar", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No. 2, pp. 145-160.
- Damanhuri, E., 2008 "Diktat Landfilling Limbah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008, 40.
- Damanhuri, E. dan Padmi, T., 2016. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Dewi, S., & Utami, R.(2021), "Efektivitas Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah", Jurnal Komunikasi dan Kebijakan, Vol. 10, No. 1, pp. 88-103.
- Handayani, S., & Rahmawati, D.,(2020), "Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Potensi dan Tantangan Daur Ulang dan Kompos di Indonesia", Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Vol. 5, No. 2, pp. 134-148.
- Handoko, S. B., & Wijaya, R,(2019), "Peran dan Ketergantungan Legislatif Daerah terhadap Eksekutif dalam Pengelolaan Sampah", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 21, No. 1, pp. 55-70.
- Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020
- Iskandar, Z., & Fatimah, S. (2019). "Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Sumatera Barat." Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan, 8(1), 34-47.

- Lestari, E., & Prasetyo, A.(2020), "Evaluasi Dampak Timbulan Sampah yang Berlebihan di Daerah Padat Penduduk di Jakarta", Jurnal Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Vol. 6, No. 1, pp. 89-103.
- Nurhadi, M. A., & Susanto, D,(2018), " Evaluasi Wewenang Legislatif Daerah dalam Pengelolaan Sampah", Jurnal Pemerintahan Daerah, Vol. 12, No. 4, pp. 200-215.
- Rahayu, N. P., & Pratama, A,(2020), "Keterbatasan Pengetahuan Lingkungan di Kalangan Anggota Legislatif Daerah", Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 5, No. 3, pp. 95-110.
- Rahmawati, L., & Setiawan, M,(2021), "Kebutuhan Investasi dalam Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Daerah Perkotaan", Jurnal Manajemen Infrastruktur, Vol. 10, No. 2, pp. 77-91.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Saputra, A. H., & Haryanto, T,(2021), "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Legislatif dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah", Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 16, No. 2, pp. 130-145.
- SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
- Sukartini, N., et al. (2020). "Analisis Dampak Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat." Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(2), 123-135.
- Susanti, A., & Prasetyo, D, (2020), "Evaluasi Pembuangan Sampah ke Sungai dan Laut di Wilayah Pesisir dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 12, No. 2, pp. 77-90.
- Utami, S., & Prabowo, T. (2020). "Analisis Kelemahan Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia". Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 15, No. 1, pp. 67-80.
- Wulandari, T., & Rahardjo, B., (2019)," Dampak Lingkungan dan Kesehatan dari Pembakaran Terbuka Sampah di Daerah Perkotaan", Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 23, No. 3, pp. 145-158.